

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada 143 responden. Responden pertama diambil pada minggu kedua bulan September 2018 yaitu sebanyak 100 responden yang sedang melakukan pembayaran pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen. Responden kedua berjumlah 43 responden yang diambil datanya pada minggu keempat bulan Oktober 2018 yang juga sedang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kebumen. Jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 162 kuesioner, 8 kuesioner tidak dapat diolah karena data yang diisi oleh responden tidak lengkap dan 11 kuesioner tidak kembali, sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis data pada penelitian ini sebanyak 143 kuesioner. Adapun analisis pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan pengisian kuesioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden	162	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	11	6,79 %
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	8	4,94%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	143	88,27%

Sumber : data primer yang diolah, 2018

1. Demografi obyek penelitian

Obyek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas wajib pajak kendaraan bermotor, meliputi usia wajib pajak, jenis kelamin wajib pajak,

pendidikan terakhir wajib pajak, pekerjaan wajib pajak, dan kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun hasil klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan usia

Hasil klasifikasi responden berdasarkan usia wajib pajak disajikan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Responden berdasarkan usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	<30 th	72	50,35%
2.	30-50 th	47	32,87%
3.	>50 th	24	16,78%
	Total	143	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang berusia kurang dari 30 tahun sebesar 50,35% atau sebanyak 72 responden, usia antara 30 sampai 50 tahun sebesar 32,87% atau sebanyak 47 responden, dan usia lebih dari 50 tahun sebesar 16,78% atau sebanyak 24 responden. Frekuensi responden paling banyak yaitu berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 72 orang atau sebesar 50,35%. Sedangkan frekuensi responden paling sedikit yaitu berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 16,78%.

b. Klasifikasi wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan jenis kelamin

Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin wajib pajak disajikan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	102	71,33%

2.	Perempuan	41	28,67%
	Total	143	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa persentase wajib pajak kendaraan bermotor dengan jenis kelamin laki-laki mempunyai persentase sebesar 71,33% atau sebanyak 102 responden. Sedangkan persentase wajib pajak kendaraan bermotor dengan jenis kelamin perempuan hanya sebesar 28,67% atau sebanyak 41 responden. Selisih persentase responden laki-laki dengan perempuan sebesar 42,66 %. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak didominasi oleh laki-laki untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

c. Klasifikasi wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan pendidikan terakhir

Hasil klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir wajib pajak disajikan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SMP	17	11,89%
2.	SMA/SMK	63	44,06%
3.	D3/S1	57	39,86%
4.	S2	6	4,19%
	Total	143	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang mempunyai pendidikan terakhir SMP sebesar 11,89% atau sebanyak 17 responden, pendidikan terakhir SMA/SMK sebesar 44,06% atau sebanyak 63 responden, pendidikan terakhir D3/S1 sebesar 39,86% atau sebanyak 57 responden dan wajib pajak kendaraan

bermotor yang mempunyai pendidikan terakhir S2 sebesar 4,19% atau sebanyak 6 responden. Frekuensi responden yang paling banyak adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 63 responden atau sebesar 44,06%. Sedangkan frekuensi responden yang paling sedikit adalah responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 6 responden atau sebesar 4,19%.

d. Klasifikasi wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan pekerjaan

Hasil klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan wajib pajak disajikan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Responden berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	PNS	27	18,88%
2.	Karyawan Swasta	44	30,77%
3.	Wiraswasta	48	33,57%
4.	Lainnya	24	16,78%
	Total	143	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS sebesar 18,88% atau sebanyak 27 responden, yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta sebesar 30,77% atau sebanyak 44 responden, yang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta sebesar 33,57% atau sebanyak 48 responden, dan yang mempunyai pekerjaan lainnya sebesar 16,78% atau sebanyak 24 responden. Frekuensi responden paling banyak adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar 33,57% atau sebanyak 48 orang. Sedangkan frekuensi responden paling sedikit adalah

responden yang mempunyai pekerja lainnya yaitu sebesar 16,78% atau sebanyak 24 orang.

e. Klasifikasi wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan kendaraan yang dimiliki

Hasil klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan wajib pajak disajikan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Responden berdasarkan kendaraan yang dimiliki

No	Kendaraan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Motor	76	53,15%
2.	Mobil	31	21,68%
3.	Angkutan	22	15,38%
4.	Truk	14	9,79%
	Total	143	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang mempunyai kendaraan motor sebesar 53,15% atau sebanyak 76 responden, yang mempunyai kendaraan mobil sebesar 21,68% atau sebanyak 31 responden, yang mempunyai kendaraan angkutan sebesar 15,38% atau sebanyak 22 responden dan yang mempunyai kendaraan truk sebesar 9,79% atau sebanyak 14 responden. Frekuensi responden paling banyak adalah responden yang mempunyai kendaraan motor yaitu sebesar 53,15% atau sebanyak 76 responden. Sedangkan frekuensi responden yang paling sedikit adalah responden yang mempunyai kendaraan truk yaitu sebesar 9,79% atau sebanyak 14 responden.

2. Uji Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan tabel hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4.7
Hasil uji statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wp	143	6	20	14,34	2,781
Kesadaran Wp	143	6	20	14,76	2,967
Sanksi Wp	143	6	20	14,55	3,182
Sistem DriveThru	143	10	25	18,99	3,450
Tingkat Penghasilan	143	4	15	11,48	2,435
Kepatuhan WP	143	7	20	14,57	3,048

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai pada variabel pengetahuan wajib pajak dari 143 kuesioner yang diolah sebagai sampel memiliki nilai skor minimum sebesar 6 dan skor maksimum sebesar 20. Nilai standar deviasi sebesar 2,781 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 14,34, dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang luas tentang manfaat dari pajak kendaraan bermotor tersebut.

Pada variabel kesadaran wajib pajak menggunakan jumlah sampel sebanyak 143 responden, variabel ini memiliki skor minimum sebesar 6 dan skor maksimum sebesar 20. Nilai standar deviasi sebesar 2,967 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 14,76, dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai minimum yang ditentukan, maka disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen cukup tinggi.

Variabel sanksi pajak menggunakan jumlah sampel sebanyak 143 responden, variabel ini mempunyai skor minimum sebesar 6 dan mempunyai skor maksimum sebesar 20. Nilai standar deviasi variabel sanksi pajak sebesar 3,182 dan mempunyai nilai rata-rata sebesar 14,55, dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai minimum yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan untuk kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen cukup tinggi.

Variabel sistem drive thru menggunakan jumlah sampel sebanyak 143 responden, variabel ini mempunyai skor minimum sebesar 10 dan mempunyai skor maksimum sebesar 25. Nilai standar deviasi dari variabel ini sebesar 3,450 dan mempunyai nilai rata-rata sebesar 18,99, dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai minimum yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem drive thru di Kabupaten Kebumen cukup tinggi.

Variabel tingkat penghasilan menggunakan jumlah sampel sebanyak 143 responden, variabel ini mempunyai skor minimum sebesar 4 dan skor maksimum sebesar 15. Nilai standar deviasi untuk variabel ini sebesar 2,435 dan mempunyai nilai rata-rata sebesar 11,48, dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai minimum yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan rata-rata masyarakat di Kabupaten Kebumen cukup tinggi.

Variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan jumlah sampel sebanyak 143 responden, variabel ini mempunyai skor minimum sebesar 7 dan skor maksimum sebesar 20. Nilai standar deviasi untuk variabel ini sebesar 3,048 dan mempunyai nilai rata-rata sebesar 14,57, dimana nilai tersebut lebih tinggi

dibandingkan nilai minimum yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kebumen cukup tinggi.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Kuesioner akan dikatakan valid apabila pada output component matrik masing-masing indikator loading faktor yang lebih dari 0,50. Hasil uji validitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Component Matrik	Loading Faktor	Hasil
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,869	0,50	Valid
	X1.2	0,880	0,50	Valid
	X1.3	0,874	0,50	Valid
	X1.4	0,846	0,50	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,893	0,50	Valid
	X2.2	0,901	0,50	Valid
	X2.3	0,880	0,50	Valid
	X2.4	0,875	0,50	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,902	0,50	Valid
	X3.2	0,906	0,50	Valid
	X3.3	0,881	0,50	Valid
	X3.4	0,878	0,50	Valid

Sistem Samsat DriveThru (X4)	X4.1	0,885	0,50	Valid
	X4.2	0,887	0,50	Valid
	X4.3	0,862	0,50	Valid
	X4.4	0,859	0,50	Valid
	X4.5	0,903	0,50	Valid
Tingkat Penghasilan (X5)	X6.1	0,931	0,50	Valid
	X6.2	0,895	0,50	Valid
	X6.3	0,923	0,50	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,884	0,50	Valid
	Y2	0,922	0,50	Valid
	Y3	0,868	0,50	Valid
	Y4	0,869	0,50	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Pada tabel hasil uji validitas di atas dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan yang berjumlah 30 item memiliki loading faktor $\geq 0,50$, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan uji validitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan seluruh item pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban dari responden terhadap suatu pernyataan adalah tetap, stabil, atau konsisten dari waktu ke waktu dilihat dari nilai Cronbach's Alpha yang harus $\geq 0,60$ agar setiap item pernyataan dinyatakan reliable. Berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas :

Tabel 4.9
Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabel	Hasil
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,888	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,909	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,912	0,60	Reliabel
Sistem Samsat DriveThru (X4)	0,926	0,60	Reliabel
Tingkat Penghasilan (X5)	0,904	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,906	0,60	Reliabel

Sumber : data yang diolah, 2018

Berdasarkan keterangan pada hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,60$ dengan demikian variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), sistem samsat drivethru (X4), tingkat penghasilan (X5) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dinyatakan reliable.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-smirnov. Residual dikatakan normal apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan angka $> 5\%$. Berikut adalah hasil pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	<i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	Distribusi
Pengetahuan WP, Kesadaran WP, Sanksi WP, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan	143	0,200	Normal

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa nilai signifikan Kolmogorov Smirnov adalah 0,200 yang lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Apabila nilai VIF > 10 dan *tolerance* < 0,10, maka variabel tersebut memiliki multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistic</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Pengetahuan WP	0,398	2,510	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran WP	0,536	1,865	Bebas Multikolinearitas

Sanksi WP	0,360	2,776	Bebas Multikolinearitas
Sistem DriveThru	0,608	1,644	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Penghasilan	0,651	1,536	Bebas Multikolinearitas

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar $2,510 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,398 > 0,1$, nilai VIF untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar $1,865 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,536 > 0,1$, nilai VIF variabel sanksi pajak adalah sebesar $2,776 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,360 > 0,1$, nilai VIF variabel sistem drive thru adalah sebesar $1,644 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,608 > 0,1$, nilai VIF variabel tingkat penghasilan adalah sebesar $1,536 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,651 > 0,1$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut bebas asumsi multikolinearitas karena masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerance yang lebih dari 0,1, yang artinya bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas atau Kolonearitas ganda diantara variabel independen dan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model regresi dinyatakan

tidak terdapat masalah heterokedastisitas apabila nilai signifikan menunjukkan angka $>$ alpha 0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai sig.	Keterangan
Pengetahuan WP	0,647	Bebas Heteroskedastisitas
Kesadaran WP	0,231	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi WP	0,514	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem DriveThru	0,513	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat Penghasilan	0,389	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk masing-masing variabel lebih dari alpha 0,05. Maka model regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas atau tidak terdapat penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik pada model regresi dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.

D. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara regresi linier berganda untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen (X) yang berupa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem DriveThru, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasil uji regresi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
Constant	1,313	1,189	0,271
Pengetahuan WP	-0,017	0,103	0,867
Kesadaran WP	0,283	0,083	0,001
Sanksi WP	0,262	0,095	0,007
Sistem DriveThru	0,166	0,067	0,15
Tingkat Penghasilan	0,208	0,092	0,026

Sumber : data primer yang dioalh, 2018

Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{KWPKB = 1,313 - 0,017 PWP + 0,283 KSP + 0,262 SP + 0,166 SDT + 0,208 TP + \varepsilon}$$

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur persentase kemampuan dari model regresi dalam menjelaskan variabel-variabel independen. Besarnya persentase variabel independen dapat diketahui dengan melihat besarnya koefisien determinasi (Adjusted R Square) dimana besarnya adalah 0 sampai 1. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square
Pengetahuan WP, Kesadaran WP, Sanksi WP, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan	0,718	0,516	0,498

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel di atas, didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,498 yang artinya variabel independen Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 49,8% sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Uji Koefisien Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (ietje nazarudin). Kriteria hasil uji koefisien parsial (uji t) yaitu apabila nilai sig < α 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima.

Berdasarkan tabel di atas. bahwa hasil uji parsial (Uji T) dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai sig 0,867 > α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan

Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁) **ditolak**.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig $0,001 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H₂) **diterima**.

c. Sanksi Pajak (X3)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Sanksi Pajak memiliki nilai sig $0,007 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H₃) **diterima**.

d. Sistem DriveThru (X4)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Sistem DriveThru memiliki nilai sig $0,015 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,166. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem DriveThru (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H₄) **diterima**.

e. Tingkat Penghasilan (X5)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Tingkat Penghasilan memiliki nilai sig $0,026 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,208. Hal ini

menunjukkan bahwa Tingkat Penghasilan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H₅) **diterima**.

3. Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Pada analisis regresi berganda dilakukan Uji F yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Menurut Ietje Nazaruddin dan Basuki (2015) Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan variabel dependen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil uji dari Uji-F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji F

Model	<i>Sun of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regresion	680,196	5	136,039	29,176	0,000
Residual	638,783	137	4,663		
Total	1318,979	142			

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Pembahasan

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,867 > \alpha 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2017) yang menyatakan bahwa penge

tahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Verani, 2013). Dengan kata lain wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Secara logika semakin baik pengetahuan dari wajib pajak tersebut maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika pengetahuan wajib pajak seseorang buruk, maka tingkat kepatuhan juga akan menurun.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang

diduga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak itu sendiri, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami tentang manfaat dan arti pajak. Dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan pajak tersebut, seharusnya petugas pajak lebih intensif dalam sosialisasi arti berpajak atau manfaat dari pajak kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui manfaat dari pajak dan juga akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

2. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha < 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang mendukung yaitu dilakukan oleh putri dan jati (2012), Susilawati dan Budiarta (2013), Ilhamsyah dkk (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Susilawati dan Budiarta (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila

wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Dengan kata lain jika kesadaran seseorang tinggi mengenai pembayaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Tetapi sebaliknya jika kesadaran seseorang rendah, maka kepatuhannya juga akan rendah.

Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Dengan diterimanya hipotesis di atas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masyarakat Kebumen tinggi, yang dapat dilihat dari tingkat kepatuhannya yang tinggi juga.

3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,007 < \alpha 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) dan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Begitu juga dengan penelitian Putri dan Jati (2012) yang

mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam upaya penegakkan hukum untuk mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013). Secara logika jika sanksi pajak semakin baik dan tertib dilaksanakan maka kepatuhan pajak seseorang dalam membayar pajak juga akan meningkat. Adanya ketegasan sanksi yang berlaku, menyebabkan masyarakat lebih tertib baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun adanya tindakan preventif dari pihak kepolisian. Masyarakat juga menyadari bahwa mereka merasa keberatan adanya sanksi yang diberikan apabila melanggar tidak membayar pajak. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah ini, maka Wajib Pajak akan bersikap patuh untuk menghindari sanksi pajak jika melakukan pelanggaran.

4. Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa samsat drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,015 < \alpha < 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Wardhani (2017) menunjukkan bahwa samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat drive thru sangat efektif.

Unit pelayanan samsat drive thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2011). Dalam hal ini pihak samsat telah melakukan inovasi sistem baru pada pelayanannya guna mempermudah pembayaran pajak dari masyarakat, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah ialah peningkatan pelayanan pada sektor publik. Secara logika jika samsat meningkatkan pelayanannya melalui sistem drive thru dan pelayanannya baik serta memuaskan bagi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak seseorang juga akan meningkat.

Adanya sistem ini berdampak besar bagi kantor samsat itu sendiri, kebanyakan masyarakat yang membayar pajak melalui samsat drive thru merasa senang, karena mereka tidak memerlukan waktu yang lama atau mengantri panjang hanya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Beda halnya dengan mereka membayar pajak melalui kantor induknya, mereka akan mengantri menurut nomor antrian yang di ambil. Dengan adanya sistem drive thru yang merupakan inovasi baru bagi sistem perpajakan telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

5. Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,026 < \alpha 0,05$. Hal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susanti (2016) yang menyatakan tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat penghasilan menjadi salah satu hal utama yang selalu diperhatikan oleh Wajib Pajak, dengan menimbang besarnya tingkat penghasilan dari individu itu sendiri, maka akan memengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika seseorang dengan tingkat penghasilan yang cukup tinggi, maka dia dengan seukarela akan membayarkan utang pajaknya, karena nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Tetapi jika seseorang dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah, mereka cenderung melupakan utang pajaknya, karena mereka memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Dengan kata lain, tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kebumen meyakini tingkat penghasilan yang tinggi atau rendah akan memengaruhi mereka dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.